

# **Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perkotaan dalam Konteks Perencanaan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Stadia Perkembangan Permukiman serta Keterkaitan Antarkawasan**

**JUNAIDI**

**Workshop Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Kawasan  
Transmigrasi Mendukung Penyusunan Permen Perencanaan  
Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

**Jakarta, 16 Desember 2014**

## 1 Pendahuluan

Berbagai realitas keberhasilan pelaksanaan transmigrasi di Indonesia selama ini telah menunjukkan bahwa transmigrasi dapat menjadi salah satu program “unggulan” dalam membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan potensi sumberdaya wilayah. Transmigrasi juga dapat menjadi contoh khas dan strategi pengembangan wilayah “original” Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran berharga dalam pengembangan potensi wilayah.

Namun, di era otonomi daerah, secara umum telah terjadi penurunan kinerja transmigrasi terutama dilihat dari penurunan penempatan transmigran. Pada Pelita VI (Orde Baru) rata-rata penempatan transmigran 350.064 KK pertahun, pada era otonomi Tahun 2000– 2004 turun menjadi 87.571 KK pertahun. Penurunan berlanjut pada Tahun 2005–2009 menjadi 41.853 KK pertahun dan menjadi 7.234 KK pertahun pada Tahun 2010-2013.

Selain akibat mulai terbatasnya ketersediaan lahan, lemahnya kelembagaan penyelenggaraan transmigrasi era otonomi di daerah serta rendahnya inisiatif daerah dalam membangun transmigrasi dengan alasan biaya (*Anharudin et al. 2008*), penyebab penurunan ini adalah adanya pembangunan transmigrasi yang bersifat eksklusif sehingga kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya (*Siswono, 2003*). Ini menyebabkan desa-desa transmigrasi yang berhasil, cenderung tumbuh menjadi kawasan “enclave” yang hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan transmigran, dengan kontribusi yang rendah pada pengembangan wilayah sekitarnya. Pada tahap selanjutnya, berdampak pada penolakan berbagai daerah untuk menjadi daerah penempatan transmigran.

Pemukiman transmigrasi selain diharapkan mampu berkembang baik, juga mampu berdampak positif pada pengembangan wilayah sekitarnya. Jika perkembangan permukiman transmigrasi tidak terkait dengan wilayah sekitarnya, akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dapat memicu ketidakpuasan antar wilayah serta membuka peluang munculnya ketidakstabilan politik daerah. Ketidakstabilan politik akan sangat merugikan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Penurunan kinerja transmigrasi juga disebabkan tidak berjalannya struktur kawasan transmigrasi yang berpola hierarkis. Pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum otonomi, sebenarnya sudah dirancang atas dasar struktur kawasan yang berciri hierarkis, dari satuan terkecil yaitu Satuan Permukiman (SP) hingga terbesar yaitu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Dalam struktur perwilayahan ini, pengembangan transmigrasi mengikuti mekanisme pasar dan berjenjang yaitu pola aliran produksi yang dihasilkan dari SP ke pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), dan pusat-pusat SKP menuju pusat WPP (Wilayah Pengembangan Parsial) dan selanjutnya dikumpulkan di pusat SWP yang merupakan pintu gerbang pemasaran ke arah luar wilayah. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat transmigran, pertama kali

masuk ke wilayah melalui pintu gerbang di pusat SWP, kemudian didistribusikan ke pusat-pusat yang lebih rendah (SKP) sampai di pusat-pusat SP. Melalui pola ini, wilayah-wilayah sekitar permukiman transmigrasi akan berkembang karena adanya keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan permukiman dengan wilayah sekitar tersebut.

Namun demikian, dalam prakteknya hal tersebut tidak selalu berlangsung sesuai dengan perencanaan (Yuniarti dkk, 2008). Ini disebabkan wilayah di luar permukiman transmigrasi yang diskenariokan sebagai pusat pelayanan proses produksi (penyedia *input*, jasa keuangan, pengolahan hasil dan pemasaran) tidak dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Faktor penyebabnya adalah tidak tersedianya infrastruktur dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung peran sebagai pusat pelayanan pada wilayah di luar permukiman transmigrasi.

Setelah otonomi daerah, pada dasarnya sudah ada pergeseran paradigma transmigrasi yang eksklusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Namun menurut Najiyati (2008) secara praktis masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigrasi yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun secara terkonsentrasi, dengan masyarakat sekitar atau setempat yang berada di luar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual, tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk perlakuan, program, dan *input* (pemberian), yang bias ke warga di dalam unit permukiman transmigrasi.

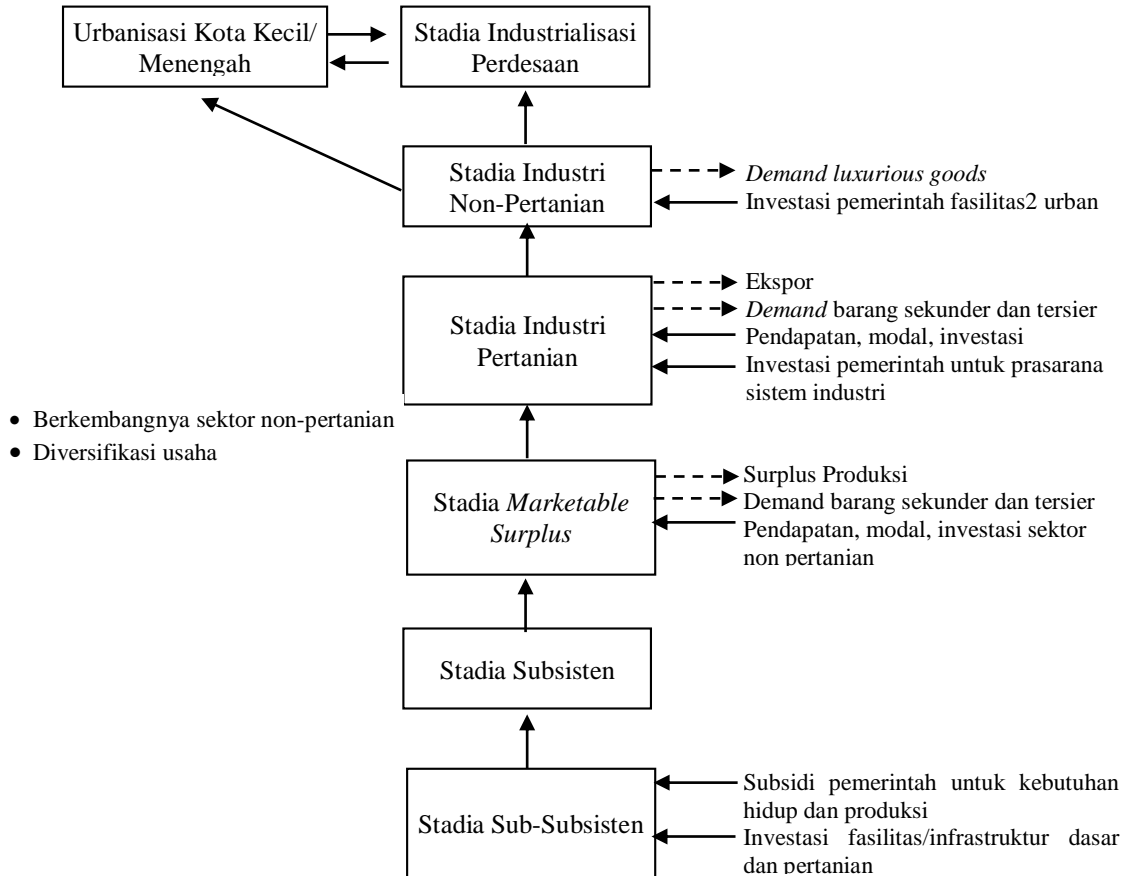
Tulisan ini mengkaji mengenai stadia perkembangan permukiman (desa) dan keterkaitan antarkawasan dalam konteks teori/konsep serta pengalaman penerapannya pada pembangunan permukiman transmigrasi di Provinsi Jambi. Dimaksudkan sebagai bahan diskusi dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perkotaan dalam Konteks Perencanaan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Stadia Perkembangan Permukiman serta Keterkaitan Antarkawasan

## **2. Stadia Perkembangan Desa (Demand Side Strategy)**

Dalam konteks transmigrasi sebagai suatu bentuk pengembangan wilayah, pada dasarnya terdapat dua strategi yang dapat digunakan yaitu *supply side strategy* dan *demand side strategy* (Rustiadi *et al.* 2009). Strategi *supply side* adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi ke luar. Kegiatan produksi terutama ditujukan untuk ekspor yang akan meningkatkan pendapatan lokal. Selanjutnya, hal ini akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah tersebut.

Strategi *demand side* adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduknya.

Melalui sudut pandang *demand side strategy*, Rustiadi *et al.* (2009) mengemukakan stadia perkembangan desa, khususnya pada stadia perkembangan kawasan transmigrasi. Stadia tersebut diberikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1 Stadia pengembangan wilayah melalui *demand side strategi* untuk kawasan transmigrasi.

Sumber: Rustiadi *et al.* (2009)

1. Stadia Sub-Subsisten. Pada tahap pertama ini transmigran masuk dalam stadia sub-subsisten selama satu tahun. Pemerintah memberikan subsidi untuk kebutuhan hidup (jadup) dan produksi. Pada tahap ini pemerintah juga membangun berbagai fasilitas/ infrastruktur dasar dan pertanian.
2. Stadia Subsisten. Transmigran masuk dalam stadia subsisten dengan bermodal lahan pekarangan dan Lahan Usaha I. Pada tahap kedua ini, transmigran diharapkan dapat memproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri (subsisten).

3. *Stadia Marketable Surplus*. Dengan adanya peningkatan sistem produksi diharapkan transmigrasi akan memasuki stadia *marketable surplus* (hasil usaha tani telah melebihi kebutuhan keluarganya) terutama setelah dapat diusahakannya Lahan Usaha II.
4. *Stadia Industri Pertanian*. Surplus hasil pertanian yang dicapai pada tahap ketiga memerlukan pengembangan industri pengolahan terutama untuk memenuhi permintaan barang-barang olahan utama. Industri hasil pertanian skala kecil meningkatkan permintaan hasil pertanian, sehingga tidak perlu menjual ke kota.
5. *Stadia Industri Non-Pertanian*. Peningkatan pendapatan transmigran yang diperoleh dari tahap 4 akan meningkatkan konsumsi produk-produk pertanian. Hal ini akan mendorong tumbuhnya industri-industri non-pertanian skala kecil.
6. *Stadia Industrialisasi Perdesaan atau Urbanisasi Kota Kecil/Menengah*. Pada tahap ini, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang mewah. Oleh karenanya akan berkembang industri-industri umum.

Merujuk pada stadia perkembangan desa tersebut, dalam kasus permukiman transmigrasi di Provinsi Jambi, stadia perkembangan desa eks permukiman transmigrasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dari *demand side strategy* khususnya setelah berada pada stadia *marketable surplus* (asumsi dasar ketika permukiman transmigrasi telah lepas bina dan diserahkan ke pemerintah daerah). Dalam kasus eks permukiman transmigrasi, setelah *stadia marketable surplus* tahapan yang dilalui desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Stadia Awal Industri Pertanian Hulu dan Non Pertanian Primer*.  
 Pada stadia ini mulai berkembang industri hulu pertanian yaitu industri yang bersifat mengolah hasil pertanian untuk bahan makanan atau industri antara lain penggilingan padi, pembuatan berbagai macam tepung, industri minyak mentah dari nabati dan hewani. Selain itu, pada stadia ini juga mulai berkembangnya industri-industri non pertanian primer seperti industri pengolahan tanah liat, barang-barang dari kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, furnitur dan barang-barang logam lainnya. Kedua kelompok industri ini merupakan industri-industri yang tumbuh karena didorong kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat.
2. *Stadia Industri Pertanian Hulu dan Non Pertanian Primer*  
 Stadia ini ditandai dengan semakin berkembangnya industri hulu pertanian dan industri non-pertanian primer. Berkembangnya industri-industri ini disebabkan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat baik sebagai akibat meningkatnya permintaan hasil pertanian (untuk bahan industri) maupun peluang kerja yang tercipta dengan adanya industri tersebut.
3. *Stadia Industri Pertanian Hilir dan Non Pertanian Sekunder/Tersier*

Berlanjutnya peningkatan masyarakat menyebabkan meningkatnya permintaan barang-barang sekunder dan tersier. Ini menyebabkan tumbuhnya industri hilir pertanian dan industri non-pertanian sekunder/tersier. Industri hilir pertanian adalah industri yang bersifat mengolah hasil pertanian untuk makanan jadi yang antara lain pembuatan tempe dan tahu, makanan dari kedele dan kacang-kacangan, pembuatan kerupuk, keripik dan sejenisnya dari ubi dan pisang, pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti asinan buah-buahan dan selai pisang.

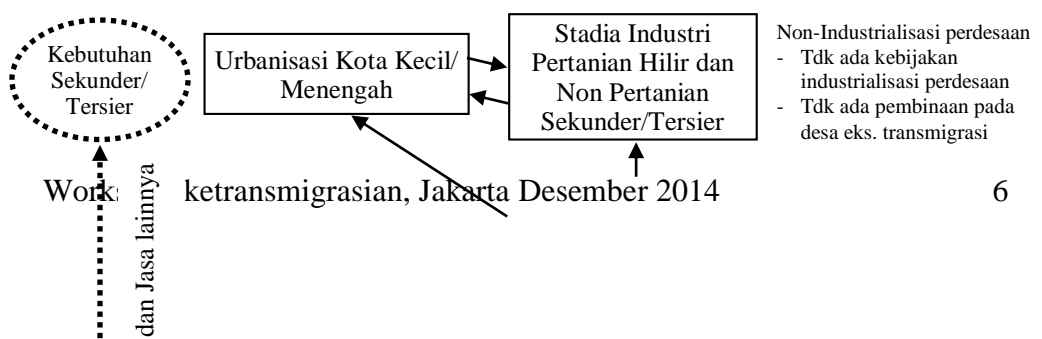
Stadia ini juga menandakan masuknya desa-desa pada tahapan urbanisasi kota kecil/menengah. Hal ini disebabkan bersamaan dengan pergeseran-pergeseran kebutuhan masyarakat dari kebutuhan primer ke tersier, aktivitas-aktivitas perdagangan dan jasa lainnya juga berkembang dari ragam jenis jasa pelayanan kebutuhan-kebutuhan primer ke arah kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier (ciri perkotaan). Selain itu, aktivitas perdagangan dan jasa ini juga merupakan faktor yang mendukung terjadi perubahan-perubahan dalam orientasi produksi industri berdasarkan perkembangan stadia desa.

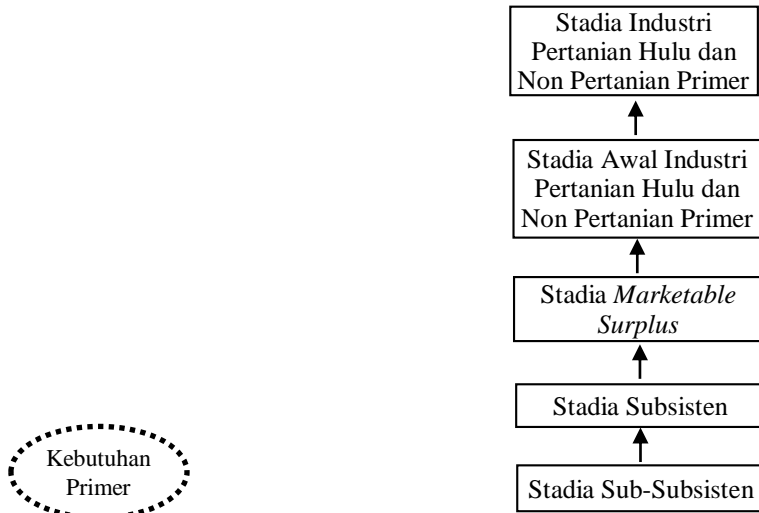
Selanjutnya, tidak seperti yang diharapkan pada *demand side strategy*, stadia mengenai industrialisasi pedesaan, di Provinsi Jambi tidak ditemukan stadia industrialisasi pedesaan, dalam artian berkembangnya industri-industri skala menengah dan besar. Sampai pada stadia terakhir, industri-industri yang berkembang adalah industri-industri skala kecil dan rumah tangga.

Terdapat dua faktor penyebab tidak ditemukannya stadia industrialisasi pedesaan ini.

- Tidak terdapatnya kebijakan yang jelas dalam pengembangan industri di pedesaan yang berbasis pada sumberdaya spesifik (keunggulan komparatif) pada masing-masing desa, sehingga jenis industri yang berkembang relatif sama antar desa. Menyebabkan keterbatasan skala produksi untuk membangun industri menengah besar. Ini disebabkan
- Tidak terdapatnya kebijakan dalam pengembangan sarana prasarana dan pembinaan sistem industri pada permukiman transmigrasi lepas bina (desa-desa eks transmigrasi)..

Model stadia perkembangan desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:





Gambar 2 Model stadia perkembangan desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi.

Sumber: Junaidi, 2012

### 3 Keterkaitan Antar Wilayah

Setiap bagian wilayah mempunyai faktor *endowment* yang khas dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk dalam wilayah tersebut sering harus memenuhinya dari wilayah lain. Hubungan ini secara ekonomi dapat digambarkan sebagai proses permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Hubungan antarwilayah dapat disebut sebagai keterkaitan (*linkages*) antarwilayah, yang dapat juga diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah, interaksi diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi. Rondinelli (1985) mengemukakan bahwa proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan di antara permukiman.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan adanya disparitas antarwilayah, maka akan terjadi hubungan timbal balik antar wilayah. Fu (1981) menggambarkan keterkaitan antar wilayah sebagai akibat ketimpangan dan kemiskinan. Terdapat tiga hubungan dualistik dalam keterkaitan antar wilayah, yaitu: 1) Utara–Selatan, menggambarkan keterkaitan antarwilayah dalam suatu negara yang menggambarkan dua kutub; 2) Perkotaan–Pedesaan, menggambarkan keterkaitan intra wilayah; 3) Formal–Informal, menggambarkan keterkaitan kegiatan antarwilayah.

Ketiga hubungan dualistik tersebut dihubungkan dan diintegrasikan dalam perilaku yang kompleks, berbeda antara satu negara dengan negara lain

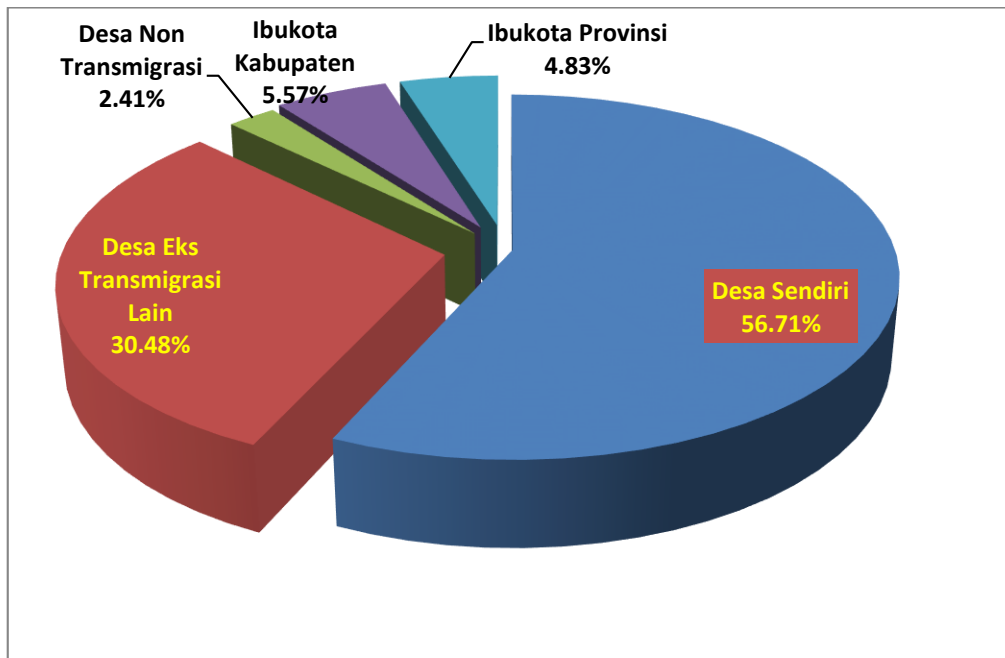
yang tergantung pada faktor dominan dan sejarah masing-masing negara. Faktor dominan tersebut adalah: 1) *Resource endowment*: pertanian, mineral dan sumber daya alam lainnya; 2) *Karakteristik demografi*: kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan dan urbanisasi; 3) *Teknologi*: tipe-tipe teknologi yang diadopsi dan pembangunan modal; dan 4) *Development ideologi*: ideologi dalam pembangunan negaranya.

Menurut Rondinelli (1985) dalam pembangunan spasial, jenis-jenis keterkaitan yang utama dapat dikelompokkan dalam tujuh tipe yaitu keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, interaksi sosial, *delivery* pelayanan, politik, administrasi dan organisasi. Dalam konteks yang lebih khusus, Pradhan (2003) mengembangkan tipologi keterkaitan perkotaan-perdesaan yaitu keterkaitan fisik/spasial, keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial-budaya, keterkaitan teknologi, keterkaitan finansial, keterkaitan politik, keterkaitan administrasi dan organisasi, keterkaitan *delivery service*.

Keterkaitan antarwilayah dapat menguntungkan, merugikan maupun saling mendukung salah satu maupun kedua wilayah yang berinteraksi tersebut. Douglas (1998) serta Harris dan Harris (1984) diacu dalam Pradhan (2003) mengemukakan bahwa apabila keterkaitan antarwilayah saling mendukung atau saling memperkuat (*mutually reinforcing*) atau generatif atau disebut partisipatif, maka kedua wilayah tersebut akan mendapat keuntungan atau manfaat dengan adanya hubungan tersebut. Tetapi bila keterkaitan antarwilayah lebih berbentuk eksploitatif atau parasitik, maka akan terjadi suatu wilayah yang semakin kaya dan semakin miskin.

Berdasarkan kajian yang dilakukan di Jambi, keterkaitan antar wilayah desa eks permukiman transmigrasi dengan wilayah sekitarnya (yang didekati melalui perjalanan penduduk untuk berbagai aktivitas sosial-ekonomi) diberikan pada gambar berikut:





Gambar 3 Interaksi Penduduk Desa Eks Transmigrasi di Provinsi Jambi dengan Wilayah Sekitarnya

Sumber: Junaidi, 2012

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa 56,71 persen perjalanan dilakukan penduduk di desa sendiri dan 43,29 persen di luar desa baik untuk aktivitas belanja kebutuhan pekerjaan, belanja, penjualan produk, keuangan dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Secara umum fakta ini menunjukkan interaksi penduduk desa eks transmigrasi relatif tinggi dengan wilayah di luar desa. Namun ditelusuri lebih jauh ternyata interaksi tersebut masih dalam kisaran desa eks transmigrasi lain, yaitu mencapai 30,48 persen dari total perjalanan. Dengan kata lain, dari total perjalanan yang dilakukan penduduk desa eks-transmigrasi, 87,19 persen dilakukan di lokasi permukiman transmigrasi (desa sendiri dan desa eks-transmigrasi lainnya). Sebaliknya hanya 2,41 persen dari total perjalanan yang dilakukan ke desa-desa non-transmigrasi, 5,57 persen ke ibukota kabupaten dan 4,83 persen ke ibukota provinsi.

Rendahnya interaksi (keterkaitan kawasan) desa eks transmigrasi dengan desa non-transmigrasi disebabkan dua hal:

1. Relatif jauhnya jarak desa-desa eks transmigrasi dengan desa non-transmigrasi
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di desa non-transmigrasi yang relatif kurang berkembang dibandingkan desa-desa eks transmigrasi.

Fenomena ini sejalan dengan hukum gravitasi Newton yang dikembangkan dalam interaksi sosial-ekonomi. Interaksi antara dua tempat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas sosial dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di dua tempat tersebut, jarak antara dua tempat tersebut dan besarnya pengaruh jarak dua tempat tersebut. Senada dengan hal tersebut Rustiadi *et al.* (2009), juga menyatakan terdapat dua prinsip dari interaksi yaitu: (1) mesin penggerak dari pergerakan dan interaksi adalah kekuatan dan dorong-tarik dari *supply-demand*; dan (2) penghambat pergerakan dan interaksi adalah pengaruh *friction of distance*.

Relatif jauhnya jarak permukiman transmigrasi dan tidak terbangunnya sistem transportasi yang menghubungkan desa transmigrasi dengan desa sekitarnya menjadi faktor penghambat terjadinya interaksi. Di sisi lain, tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa sekitar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional (dalam *supply-demand*) dengan desa transmigrasi menyebabkan tidak terbentuknya mesin penggerak dari interaksi.

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang tidak berimbang ini juga mulai memunculkan fenomena yang biasanya dikenal dalam keterkaitan desa kota, yaitu *backwash effect*. Meningkatnya sumber daya ekonomi di desa eks transmigrasi tidak secara otomatis diikuti peningkatan aksesibilitas masyarakat desa sekitarnya pada sumber daya ekonomi tersebut. Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya potensi masyarakat di desa eks transmigrasi dalam memanfaatkan sumber daya desa-desa sekitarnya. Fenomena ini terlihat dari mulai ditemukannya penduduk di desa-desa eks transmigrasi yang diteliti yang memiliki lahan pertanian yang bersumber dari pembelian lahan penduduk desa sekitarnya.

Selain faktor tersebut, rendahnya interaksi antara desa-desa eks transmigrasi dengan desa sekitarnya juga disebabkan masih lemahnya upaya-upaya pengembangan modal sosial pada tingkat komunitas. Menurut Woolcock (1998), diacu dalam Rustiadi (2009) salah satu ciri penting modal sosial pada tingkat komunitas adalah keterkaitan (*linkage*) dalam suatu jaringan (*network*).

Berdasarkan unsur *networking*, modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu (1) *bonding social capital* yang dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti antara anggota keluarga atau antara anggota dalam kelompok etnis tertentu, yang terbangun dengan *thick trust* karena adanya rasa percaya antar kelompok orang yang saling mengenal; (2) *bridging social capital* yang dicirikan oleh semakin banyaknya ikatan antarkelompok misalnya asosiasi bisnis, kerabat, teman dari berbagai kelompok etnis yang berbeda, yang terbangun dengan *thin trust*, rasa percaya terhadap sekelompok orang yang belum dikenal; dan (3) *linking social capital*, yang dicirikan oleh hubungan antara berbagai tingkat kekuatan dan status sosial yang berbeda seperti antarindividu dari berbagai kelas yang berbeda.

Lemahnya pengembangan modal sosial ini khususnya dalam konteks *bridging social capital* terlihat dari fakta di desa penelitian tidak terdapatnya forum-forum ataupun lembaga/perkumpulan/organisasi yang melibatkan secara bersama-sama masyarakat di desa transmigrasi dan sekitar desa transmigrasi. Di desa penelitian sebagai contoh, kelompok tani, koperasi, arisan warga, perkumpulan olahraga terbentuk secara terpisah antara desa transmigrasi dengan desa sekitarnya. Fakta ini diperkuat dengan kebijakan menjadikan desa eks transmigrasi sebagai desa administratif baru yang terpisah dari desa induknya maupun desa setempat.

Selain itu, pada tahap pembinaan, perlakuan hanya diberikan pada transmigran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya baik secara sosial ekonomi, budaya dan fisik, dan tidak ada perlakuan yang sama pada masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Ini menyebabkan rendahnya proses penyesuaian masyarakat di sekitar desa transmigrasi terhadap budaya baru dari pendatang dan pada tahap selanjutnya tidak berkembangnya rasa percaya antara penduduk setempat dengan transmigran.

#### **4 Kebijakan dan Strategi**

Tidak berkembangnya eks permukiman transmigrasi sampai pada stadia industrialisasi perdesaan disebabkan dua faktor utama: 1) Keterbatasan skala produksi untuk membangun industri menengah besar. Ini disebabkan tidak terdapatnya kebijakan yang jelas dalam pengembangan industri di perdesaan yang berbasis pada sumberdaya spesifik (keunggulan komparatif) pada masing-masing desa, sehingga jenis industri yang berkembang relatif sama antar desa; 2) Tidak terdapatnya kebijakan dalam pengembangan sarana prasarana dan pembinaan sistem industri pada permukiman transmigrasi lepas bina (desa-desa eks transmigrasi).

Terkait dengan hal tersebut, dalam kerangka perencanaan kawasan transmigrasi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan kawasan transmigrasi khususnya dalam perencanaan pengembangan industri perdesaannya dengan perencanaan (masterplan) pengembangan industri perdesaan daerah (kabupaten/provinsi) tujuan.
2. Skema pembinaan kawasan transmigrasi dalam dua tahap pembinaan. Pembinaan tahap 1 dirancang untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi dari stadia sub-subsisten menuju stadia marketable surplus. Pembinaan tahap 2 dirancang untuk tujuan mempersiapkan sarana-prasarana dan sistem industri perdesaan.

Selanjutnya, pembangunan kewilayahan transmigrasi secara hirarkies pada dasarnya mengacu pada teori tempat sentral yang menyatakan adanya hirarkie tempat di mana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat

yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Pembangunan transmigrasi tersebut juga pada dasarnya mengacu pada teori pusat pertumbuhan yang terlihat dari tujuan pembangunan transmigrasi untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. Dengan berkembangnya permukiman transmigrasi diharapkan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong ekspansi yang besar di daerah sekitarnya melalui perkaitan antarindustri serta *demand-supply*.

Namun hal tersebut tidak berlangsung sesuai dengan konsep yang direncanakan, karena tidak tersedianya infrastruktur, fasilitas dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung peran sebagai pusat pelayanan pada wilayah-wilayah di luar permukiman transmigrasi. Tidak terbangunnya berbagai infrastruktur dan kelembagaan menyebabkan tidak tumbuhnya berbagai aktivitas produksi di luar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional dengan permukiman transmigrasi.

Pada dasarnya, aplikasi konsep pusat pertumbuhan dalam pembangunan wilayah tidak akan dapat menghasilkan ekspansi yang besar ke daerah sekitarnya jika tidak terdapat interaksi yang kuat antara *core* (pusat pertumbuhan) dengan daerah tepi (*peripheri*). Oleh karenanya dalam pembangunan pusat pertumbuhan harus diikuti dengan kebijakan/intervensi pemerintah untuk menumbuhkan interaksi antara *core* dan *peripheri* ini.

Selanjutnya, interaksi yang dibangun tidak hanya mencakup interaksi *demand-supply* secara ekonomi, tetapi juga harus melibatkan interaksi sosial antara permukiman transmigrasi dengan desa-desa setempat. Interaksi sosial yang kuat diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi antara pendatang dengan budaya yang berbeda terhadap penduduk setempat. Interaksi sosial ini juga akan menjadi faktor pendukung ke pencapaian interaksi *demand-supply* yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut dalam pengembangan transmigrasi, diperlukan pola pembangunan kawasan transmigrasi dengan pendekatan pusat pertumbuhan yang terintegrasi secara sosial-fungsional-spasial melalui:

1. Peningkatan interaksi secara sosial. Dilakukan melalui pendekatan pengembangan modal sosial dalam masyarakat khususnya dalam konteks *bridging social capital*. Dalam peningkatan interaksi sosial ini perlu dibentuk forum-forum atau pun lembaga/perkumpulan/organisasi yang melibatkan secara bersama-sama masyarakat di desa transmigrasi dan masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Selain itu, pada tahap pembinaan (sub-tahap penyesuaian), perlakuan tidak hanya diberikan kepada transmigran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya baik secara sosial ekonomi, budaya dan fisik, dan tetapi perlakuan yang sama juga perlu diberikan kepada masyarakat di sekitar desa transmigrasi dengan tujuan meningkatkan proses penyesuaian masyarakat di sekitar desa transmigrasi terhadap budaya baru dari pendatang.

2. Peningkatan interaksi fungsional. Keterkaitan fungsional dalam hal ini adalah keterkaitan antara core dan periphery. Oleh karenanya, dalam perencanaan kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas dan kelembagaan harus memiliki dua pola yang terkait yaitu pola untuk wilayah core dan pola untuk wilayah periphery.
3. Peningkatan interaksi spasial. Dilakukan melalui peningkatan keterkaitan fisik yang kuat antardesa. Oleh karenanya dalam perencanaan kawasan transmigrasi selain memperhatikan efisiensi optimum perjalanan penduduk secara internal desa, juga perlu mempertimbangkan optimisasi interaksi spasial antara desa.

## REFERENCES

1. Adisasmita R. (2008). *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Jakarta: Graha Ilmu.
2. Anharudin, Priyono, Susilo SRT. (2008). *Transmigrasi di Era Kabinet Indonesia Bersatu*. Jakarta: Bangkit Daya Insana
3. Douglass M. (1998). A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. *Third World Planning Review* 20(1): 1-22
4. Ernan Rustiadi, Junaidi. (2011). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. Makalah. Jakarta. Kementerian Transmigrasi RI.
5. Fu CL. (1981). *Rural-Urban Relations and Regional Development*. Singapore: Huntsmen Offset Printing Pte Ltd.
6. Hadjisarosa P. (1982). *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: BP PU.
7. Hardiani, Junaidi. (2011) Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. Jakarta. BKKBN RI dan PSK UNJA
8. Junaidi. (2012). “Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan Ke Depan (Kajian di Provinsi Jambi)”. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor
9. Junaidi , Hardiani. (2009). *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*. Jakarta. Hamada Prima
10. Junaidi,J; Rustiadi, E; Slamet, S; Juanda, B. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah; Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. *Visi Publik* 9 (1); 522-534
11. Junaidi. (2012). *Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan ke depan (Kajian di Provinsi Jambi)*. Disertasi. Bogor. IPB

12. Malmberg A, Maskell P. (1997). Towards an Explanation of Industry Agglomeration and Regional Specialization. *European Planning Studies* 5(1): 25-41.
13. Mercado RG. (2002). *Regional Development in The Philippine: A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action*. Discussion Paper Series. Philippine: Institute for Development Studies.
14. Najiyati S. (2008). *Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.
15. Pradhan PK. (2003). *Manual for Urban Rural Linkage and Rural Development Analysis*. Kirtipur Kathmandu: New Hira Books Enterprises.
16. Rondinelli DA. (1985). *Applied Methods of Regional Analysis – The Spatial Dimension of Development Policy*. London: Westview Press, Inc.
17. Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
18. Siswono Y. (2003). *Transmigrasi – Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
19. Stimson RJ, Stough RR, Roberts BH. (2002). *Regional Economic Development: Analysis and planning Strategy*. Berlin: Springer
20. Yuniarti L, Wibowo DP, Priyono, Nushah (2008). *Kebijakan dan Pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.